

Peran Advokasi Non-Governmental Organization Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia dalam Konservasi Primata Jenis Kukang di Indonesia

Sahda Nabilah Agusta^{1*}, Wildan Faisol¹

¹Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Al-Azhar Indonesia, Jl Sisingamangaraja, No.2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12110.

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: hallo.sahda@gmail.com

Abstract

Environmental issues in International Relations study not only stand for climate issues and human existence. Environmental issues in International Relations study also give some space to flora and fauna conservation issues. In this article, the author tries to explain how non-state actor in this case YIARI effort to advocate for primate animal conservation like Coucang in Indonesia. In this article, the author found some facts to explain that the strategy of YIARI use is showing a positive trend with decreasing number of coucang illegal trafficking in Indonesia. One of the factors that determine the success of YIARI's advocacy is the transnational advocacy network that connects YIARI with fellow non-governmental organizations engaged in the field of animal conservation worldwide. In addition, the author argues that the role of YIARI has succeeded in replacing the role of the Indonesian government which is not optimal for law enforcement to act against the perpetrators of the exploitation of Coucang.

Keywords: Coucang, NGO, Transnational Advocacy Network, YIARI

Abstrak

Isu-isu lingkungan dalam studi hubungan internasional tidak hanya berfokus pada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan alam dan kelangsungan hidup manusia. Isu-isu lingkungan dalam studi hubungan internasional juga memberikan ruang bagi kajian konservasi flora dan fauna. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan bagaimana peran aktor non-negara yang dalam hal ini YIARI dengan usahanya untuk melakukan advokasi dalam konservasi hewan primata jenis Kukang di Indonesia. Penulis dalam artikel ini menggunakan teori Jaringan Advokasi Transnasional untuk menjelaskan bagaimana YIARI memaksimalkan perannya untuk aktif dalam mengadvokasi isu konservasi kukang di Indonesia. Dalam artikel ini, penulis menemukan beberapa fakta bahwa strategi yang digunakan YIARI berhasil menunjukkan dampak positif dengan penurunan angka tren yang signifikan dalam fenomena eksploitasi kukang di Indonesia. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan advokasi YIARI adalah jejaring advokasi transnasional yang menghubungkan YIARI dengan sesama organisasi non-pemerintah yang sama-sama bergerak di bidang konservasi hewan sedunia. Selain itu penulis berargumen bahwa peran YIARI berhasil menggantikan peran pemerintah Indonesia yang tidak maksimal dalam penegakan hukum untuk menindak pelaku-pelaku eksploitasi hewan kukang.

Kata Kunci: LSM, YIARI, Konservasi, Kukang, Jejaring Advokasi Transnasional

PENDAHULUAN

Kukang (*Nycticebus sp*), merupakan salah satu spesies primata yang populasi penyebarannya banyak di Asia Tenggara, termasuk Indonesia khususnya di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Batam (Matondang, 2018). Kukang merupakan mamalia nokturnal ditetapkan sebagai satwa terancam punah oleh IUCN Redlist (CNN Indonesia, 2021), Kukang menjadikan Hutan Hujan Tropis sebagai habitatnya, dimana Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi habitat Kukang kerap diwarnai oleh kasus-kasus eksploitasi satwa liar meliputi kegiatan deforestasi hingga perburuan liar yang mengancam populasi Kukang sebagai primata. Hal ini dibuktikan dengan munculnya Surat Keterangan Menteri Pertanian 14 Februari 1973 No. 66/Kpts/Um/2/1973 tentang keberadaan primata jenis Kukang sebagai satwa dilindungi Indonesia. Selain itu, UU No. 5 Tahun 1990 turut menegaskan terkait status hukum dan larangan untuk memburu, memperjualbelikan, memelihara satwa dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati, meliputi seluruh bagian tubuhnya terancam pidana dengan maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 juta rupiah.

Primata jenis Kukang menjadi sasaran eksploitasi di Indonesia dimana Kukang dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan statusnya yang terancam punah. Selain dinilai menggemaskan untuk dijadikan satwa peliharaan, Kukang sebagai primata bertubuh kecil dengan pergerakan yang lambat juga dipercayai memiliki manfaat dari sisi kesehatan dan juga kepercayaan mitos yang beredar di masyarakat bahwa daging Kukang memiliki khasiat bagi stamina dan gigi Kukang dipercayai sebagai jimat pelindung. Adapun untuk memperoleh gigi Kukang, pemburu atau pedagang akan mencabut, mengikir atau bahkan memotong secara paksa tanpa menggunakan obat bius terhadap Kukang. Hal ini berpotensi menyebabkan timbulnya infeksi pada Kukang dan juga infeksi berujung kematian bagi pemburu atau pedagang yang terkena bisa dari gigitan Kukang. Fenomena tersebut menjadi gambaran bagaimana kesadaran dan

pengetahuan masyarakat tentang primata jenis Kukang masih sangat rendah.

Isu ini tidak lepas dari pengamatan Non-Governmental Organization (NGO) yang berkontribusi di bidang lingkungan, termasuk di dalamnya isu eksploitasi satwa liar yang mengiringi isu deforestasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data publikasi milik Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) melalui website Kukangku.id (2022) tentang eksploitasi terhadap primata jenis Kukang yang dilakukan secara terang-terangan oleh komunitas antar pemilik primata jenis Kukang di Indonesia yang muncul di tahun 2013 s.d. 2015. Di akhir Januari 2017 sedikitnya terdapat 27 individu Kukang Jawa hasil sitaan dari perdagangan dalam dunia maya di wilayah Cirebon dan Majalengka untuk kemudian dikirim ke Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Primata di YIARI selaku Organisasi Non-Profit. Di tahun yang sama pada tanggal 20-21 September 2017, Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Harimau Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) wilayah Sumatera berhasil mengamankan 9 individu Kukang Sumatera (*Nycticebus coucang*) dari perdagangan satwa liar. Lalu, penyelundupan 79 ekor Kukang Jawa (*Nycticebus javanicus*) yang akan dikirim ke Hongkong berhasil ditemukan dan dihentikan di daerah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Kukangku, 2020).

Berperannya aktor non-negara seperti YIARI merupakan dampak yang terjadi pasca berakhirnya perang dingin, ketika hubungan internasional masuk ke dalam sistem multipolar yang merupakan peralihan dari persaingan militer ke arah persaingan ekonomi (Perwita & Yani, 2017). Perkembangan tersebut membawa Studi Hubungan Internasional kepada isu low politics yang lebih luas dan menyeluruh. Hal ini senada dengan pandangan Alejandro M. Pena (2019) yang mengatakan bahwa perubahan lanskap Tata Kelola Global berubah secara dramatis yang ditandai dengan kemunculan aspek-aspek low politics-Perdagangan, Produksi, dan Tata Kelola Sosio-Lingkungan dalam tiga dekade terakhir (Pena, 2019; Davis,

2019). Studi Hubungan internasional pasca era perang dingin juga memberikan tempat khusus bagi aktor-aktor non-negara berupa NGO dan *Global Civil Society Organization* (CSO) untuk memaksimalkan perannya sebagai norm entrepreneurs dalam berbagai hal seperti demokrasi, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), konservasi lingkungan, flora dan fauna, penegakan keadilan, diskriminasi gender dan suku (Hadiwinata, 2017).

Kajian mengenai peran NGO juga dibahas dalam Transnational Relations atau Hubungan Transnasional dalam Hubungan Internasional yang meyakini bahwa aktor non-negara dapat memengaruhi sistem politik internasional dan nasional. Aktor non-negara memiliki kemampuan untuk melakukan “*Tranfering tangible or intangible items across state boundaries*” (Keohane dan Nye, 1971, pp.25). Dalam hal ini aktor non-negara dinilai dapat mengubah fakta yang memiliki sifat material atau empiris dan fakta non material menjadi sebuah isu internasional melalui advokasi yang dilakukan. Advokasi yang dimaksud dalam hal ini ialah suatu usaha yang ter-sistematis dan ter-organisasi untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap (Soetjipto, 2018).

Dalam hubungan transnasional YIARI hadir sebagai NGO lokal yang berafiliasi dengan International Animal Rescue pada tahun 2008 dan bergerak di bidang lingkungan dan kesejahteraan satwa di Indonesia dengan berbasis pada prinsip 3R dan M: Rescue, Rehabilitation dan Released serta Monitoring. Kehadiran NGO seperti YIARI semakin menegaskan bahwa penting untuk mengkaji bagaimana perlindungan terhadap primata jenis Kukang dapat diterapkan melalui peran NGO sebagai aktor non-negara. Dalam 12 tahun melakukan konservasi Kukang, YIARI berhasil menyelamatkan 3500+ individu Kukang di Indonesia melalui jejaring-jejaring baru dengan mitra organisasi non-profit, komunitas, dan pemerintahan guna memudahkan perannya. YIARI didukung oleh Inisiasi Alam Rehabilitasi (IAR) Inggris yang menjadi donor dana utama dalam setiap programnya termasuk program kampanye “Kukangku” sebagai bentuk upaya

advokasi perlindungan bagi satwa liar dilindungi dan primata. Tulisan ini berada dalam posisi untuk melihat NGO YIARI sebagai tingkat Analisis dan Pemerintah sebagai aktor target terkait advokasi isu eksploitasi primata jenis Kukang dalam rentang waktu yang dimulai pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Rentang waktu dalam penelitian ini dipilih, karena advokasi terkait konservasi primata jenis Kukang yang dilakukan oleh YIARI pada tahun 2015 mulai menunjukkan hasil positif yang signifikan. Hal tersebut juga didorong dengan karakteristik NGO yang khas dalam menjalani perannya, yakni mampu memfasilitasi komunikasi (*facilitating communication*), Mendukung Inovasi, Advocacy for and with the poor, dan Research, Monitoring and Evaluation (Dindin dkk., 2011). Tulisan ini bertujuan untuk melihat peran Advokasi NGO aktor non-negara dalam upaya perlindungan primata jenis Kukang di Indonesia.

Kajian Pustaka

Penelitian milik Muhammad Arief Virgy, Yusa Djuyandi, dan Wawan Budi Darmawan (2020) berjudul “*Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi hutan Indonesia oleh Wilmar International*” yang memiliki karakteristik deskriptif analitis. Peneliti terdahulu menjadikan konsep Transnational Advocacy Networks (TAN) dalam menganalisis strategi advokasi Greenpeace Indonesia sebagai aktor non-negara terkait isu deforestasi hutan yang dilakukan oleh Wilmar International. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa aktor advokasi yang dalam hal ini adalah Greenpeace Indonesia memiliki peran besar dalam mempengaruhi berhasil atau tidak berhasilnya aksi advokasi yang dilancarkan dalam menyikapi isu deforestasi hutan di Indonesia yang dilakukan oleh Wilmar Internasional.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Jaringan Advokasi Transnasional*”. Strategi Greenpeace dalam Menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara tahun 2012-2015” ditulis oleh Yanuar Albertus dan dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional parahyangan *Centre for International Studies*

(PACIS), Vol. 17 No. 2, Hal. 239-260. Albertus menjadikan *Transnational Advocacy Network* (TAN), *Non-Governmental Organization* (NGO), dan Kebijakan Korporasi sebagai kerangka dasar pemikiran dalam penelitiannya yang berfokus pada Strategi advokasi Greenpeace dalam penolakan rencana pengeboran Shell di Kutub Utara. Penelitian milik Albertus menghasilkan kesimpulan bahwa TAN dapat menjadi strategi yang efektif bagi NGO dalam dunia aktivisme. Hal tersebut dibuktikan dengan strategi Greenpeace yang berhasil memengaruhi LEGO sebagai stakeholders Shell untuk menghentikan pengeboran di Kutub Utara.

Penelitian ini berjudul “Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional dalam Penanganan pencemaran Sungai Citarum” yang ditulis oleh Prilla Marsingga pada tahun 2020. Penelitian ini menjadikan TAN sebagai alat untuk menganalisis peran aktor transnasional dalam penanganan pencemaran Sungai Citarum sebagai bagian dari Keamanan Lingkungan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marsingga dengan TAN sebagai alat analisisnya menunjukkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan oleh aktor transnasional berhasil mempengaruhi pemerintah dalam menciptakan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi pencemaran Sungai Citarum. Dalam hal ini TAN sebagai alat analisis juga berhasil mengadakan agenda-agenda yang menghasilkan solusi yang signifikan dan juga memotivasi Pemerintah untuk melakukan aksi nyata.

Penelitian ini berjudul “Peran European Women’s Transnational Advocacy Networks (TAN) dalam Mengkonstruksi Regime Kesetaraan Gender di Uni Eropa” milik Nur Azizah dan Sri Asrafina yang diterbitkan pada tahun 2019 dalam *Indonesian Journal of International Relations*. Penelitian ini menjadikan Advokasi, *Transnational Advocacy Networks* (TAN), dan *Regime* Internasional sebagai konsep dalam menganalisis peran *European Women’s TAN’s* dalam merekonstruksi regime kesetaraan gender di Uni Eropa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Azizah dan Asrafina 2019 dapat disimpulkan bahwa advokasi yang dilakukan

oleh *European Women’s* berhasil mengkonstruksi regime kesetaraan gender di Eropa yang pada akhirnya mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ramah terhadap perempuan dan mewujudkan tingkat kesetaraan gender yang tinggi.

Penelitian dengan judul “Seafood not Slavefood”. Advokasi Aktivisme Transnasional Mengakhiri Praktik Perbudakan Modern di Industri Pakanan Thailand” ditulis oleh Roihanatul Maziyah pada tahun 2020 dan dipublikasi dalam *Journal of International Relations*, Vol. 6 No. 1, 2020, hal. 92-107. Penelitian milik Maziyah 2020 menjadikan TAN sebagai kerangka dasar pemikiran dalam mengamati peran jaringan advokasi transnasional Environmental Justice Foundation (EJF) dalam meng-advokasikan praktik perbudakan modern yang terjadi di Industri perikanan Thailand pada tahun 2013-2019. Dalam penelitiannya, Maziyah menyimpulkan bahwa peran advokasi yang dilakukan oleh EJF melalui serangkaian strategi advokasi (*Information Politics, Symbolic Politics, Leverage Politics, dan Accountability Politics*) telah berhasil memengaruhi pemerintah Thailand untuk meratifikasi *ILO Work in Fishing Convention dan Protocol Amending Forced Labor Convention*.

Penelitian milik penulis dapat dibedakan dengan kelima penelitian pendahuluan di atas melalui tingkat analisis, aktor target, dan pendekatan/konsep yang digunakan. Dalam penelitian milik peneliti, Tingkat Analisis yang dipilih adalah YIARI dan Pemerintah Indonesia sebagai Aktor Target Advokasi. Lalu, peneliti menggunakan teori Konstruktivisme dan konsep TAN sebagai alat analisis. Adapun hal tersebut beriringan dengan gap isu empiris yang memperkuat argumentasi penulis terkait penelitian dengan judul “Peran Advokasi YIARI dalam Konservasi Primata Kugang di Indonesia” adalah sebuah penelitian dengan subjek penelitian yang sama sekali baru untuk melanjutkan penelitian-penelitian terdahulu dengan menggunakan konsep yang sama, yakni TAN.

Konstruktivisme

Konstruktivisme ialah sebuah pendekatan teoritis dalam studi Hubungan Internasional Kontemporer yang muncul pasca Perang Dingin pada tahun 1980an dan mulai populer pada tahun 1990an. Konstruktivisme hadir untuk mengkritik pandangan teori-teori tradisional Hubungan Internasional yang hanya melihat negara sebagai aktor utama dalam Hubungan internasional. Dalam hal ini Konstruktivisme melihat bahwa aktor negara dan aktor non-negara memiliki peran yang sama pentingnya dalam mengkonstruksi struktur sosial. (Dugis, 2016).

Konstruktivisme dipandang sebagai sebuah cara untuk mengkaji segala bentuk hubungan sosial yang digunakan secara sistematis guna menemukan nilai dalam beragam material dan menciptakan keterkaitan yang sebelumnya dinilai mustahil. Konstruktivisme sebagai pendekatan teoritis meyakini bahwa manusialah yang membangun dunia melalui interaksi dengan manusia lainnya. Bagi Dugis 2016 interaksi atau kerjasama terbentuk berdasarkan adanya identifikasi kesamaan kepentingan atau tujuan. Konstruktivisme juga meyakini bahwa *Saying is Doing*, karena berbicara merupakan cara terpenting yang harus dilakukan dalam membangun dunia (Onuf, 2013), manusia sebagai agen memiliki kemampuan untuk menjadikan manusia lainnya sebagai agen berikutnya dengan memberikan kesempatan bertindak guna mencapai tujuan tertentu.

Menurut pemikiran (Onuf, 2013), konstruktivisme merupakan sebuah kajian yang cenderung menjadikan aturan sebagai sebuah awal yang cukup cepat mengarah ke pola yang hanya bisa digambarkan sebagai sebuah kondisi dari aturan itu sendiri. Aturan merupakan pola hubungan yang tidak asimetris, namun stabil. Konstruktivisme meyakini bahwa manusia membangun masyarakat dan masyarakat membentuk manusia. Hal ini dijelaskan sebagai aturan (*rules*) sebagai salah satu elemen konstruktivis yang menghadirkan proses dimana manusia dan masyarakat saling membentuk dan saling timbal balik antara satu dengan yang lain. “*where there are rules (and thus institutions), there is rule* (Onuf, 2013)”.

Dalam hal ini, Konstruktivisme meyakini adanya kondisi dimana aturan digunakan oleh beberapa agen atau aktor untuk mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari agen lain. Sebagai elemen penting, *rules* dalam pendekatan Konstruktivisme memandang manusia sebagai agen yang berpartisipasi aktif melalui aturan itu sendiri. Sejalan dengan tulisan (Hobson, 2003), yang meyakini bahwa individu, kelompok masyarakat, dan negara dalam hubungan internasional dibentuk oleh norma-norma. Hal tersebut dapat menjelaskan bagaimana Konstruktivisme memungkinkan manusia untuk melakukan aksi dalam konteks membangun masyarakat sebagai individu maupun kolektif yang di dalamnya meliputi aturan, praktik, dan fakta yang dibentuk dan digunakan. (Onuf, 2013).

Transnational Advocacy Network (TAN)

Dalam menganalisis strategi yang digunakan YIARI dalam konservasi primata jenis Kukang di Indonesia, peneliti menggunakan TAN sebagai alat yang membantu dalam proses penelitian. TAN merupakan generasi ketiga paradigma Konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional yang memungkinkan manusia untuk melakukan aksi dalam konteks membangun masyarakat sebagai individu maupun kolektif yang di dalamnya meliputi aturan, praktik, dan fakta yang dibentuk dan digunakan (Onuf, 2013), TAN hadir untuk mengkaji mengenai aktor-aktor relevan yang bergerak di suatu isu yang saling terikat atas nilai kebersamaan, kesamaan tujuan, dan pertukaran informasi serta layanan (Keck & Sikkink, 1998), termasuk Organisasi Riset dan Advokasi Non Pemerintah-Domestik dan Internasional-sebagai aktor utama. (Keck & Sikkink, 1998), konsep TAN mampu memperlihatkan urgensi studi Gerakan sosial yang pada awalnya bergerak pada tatanan mikro atau domestik di suatu negara kemudian menyadari akan pentingnya kajian hubungan internasional dan membawa pemikiran dalam studi gerakan sosial tersebut ke level internasional (Soetjipto, 2018), konsep TAN merujuk pada kelompok advokasi yang secara mandiri beroperasi secara sukarela bekerja lintas batas negara demi mencapai kepentingan publik internasional. Jaringan transnasional yang lintas

batas cenderung melibatkan sejumlah aktivis dari berbagai organisasi dan institusi dalam membawa kampanye atau peran advokasi, sehingga YIARI sebagai NGO menggunakan empat strategi berbentuk tindakan persuasi, sosialisasi, dan penekanan, yakni *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, dan *Accountability Politics* (Keck & Sikkink, 1998).

Tulisan ini berada dalam posisi untuk melihat NGO YIARI sebagai tingkat Analisis dan Pemerintah sebagai aktor target terkait advokasi isu eksploitasi primata jenis Kukang dalam rentang waktu 2015 hingga 2020. Rentang waktu dalam penelitian ini dipilih, karena advokasi terkait eksploitasi primata jenis Kukang yang dilakukan oleh YIARI pada tahun 2015 mulai menunjukkan hasil positif yang signifikan, NGO memiliki karakteristik yang khas dalam menjalani perannya diantaranya ialah mampu memfasilitasi komunikasi (*facilitating communication*), Mendukung Inovasi, Advocacy for and with the poor, dan Research, Monitoring and Evaluation (Dindin dkk., 2011, p. 1-2). Dalam hal ini penulis melihat peran dan fungsi NGO sebagai solusi alternatif dalam upaya perlindungan primata jenis Kukang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Kualitatif. (Creswell, 2014) dalam bukunya yang berjudul *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches Fourth Edition*, Penelitian Kualitatif merupakan sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok atas permasalahan sosial atau manusia. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah Dokumen Kualitatif (*Qualitative Document*) dengan mengumpulkan buku, artikel berita, jurnal ilmiah, dan laporan resmi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian (Creswell, 2009), peneliti juga menggunakan Teknik Wawancara Kualitatif (*Qualitative Interview*) melalui Teknik Purposefully Select. Dalam prosesnya,

penelitian kualitatif melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan prosedur, pengumpulan data diperoleh dari setting partisipan, analisis data dibuat secara induktif dari tema khusus ke umum, dan peneliti membuat interpretasi atas data (Creswell, 2014), *setting* partisipan yang dimaksud ialah informan atau narasumber sebagai subjek yang memberikan data primer melalui Metode wawancara. Penelitian ini menjadikan Staff Manajer YIARI sebagai informan. Sementara itu, objek penelitian yang dikaji adalah Peran NGO YIARI dalam Konservasi Primata Jenis Kukang di Indonesia. Waktu penelitian dimulai sejak Juli 2021 hingga November 2021. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, data display, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Sebagai Aktor Non-Negara

YIARI merupakan NGO lokal yang didirikan oleh Dr. Karnele Llano Sanchez. Karnele merupakan Direktur Eksekutif YIARI dan juga menjadi koordinator tim medis. Pada awalnya, Karnele merupakan anggota volunteer dalam kegiatan konservasi dimana beliau bertemu dengan banyak pemuda pemudi Indonesia yang memiliki antusiasme dan keyakinan dalam konservasi alam dan kesejahteraan satwa di Indonesia. Atas dasar antusiasme dan keyakinan yang sama tersebutlah YIARI berdiri sebagai NGO di Indonesia. Kehadiran YIARI pada tahun 2007 kemudian diiringi dengan berkembangnya relasi mitra melalui afiliasi antara YIARI dengan IAR Inggris pada tahun 2008. Hal tersebut didorong oleh adanya kesamaan cita-cita dan harapan yang dimiliki oleh anak-anak muda Indonesia dalam menyuarakan isu lingkungan dan kesejahteraan satwa di Indonesia yang kaya akan sumber daya hayati dan non hayati.

YIARI menilai bahwa tanggung jawab atas penjagaan alam merupakan tanggung jawab yang semestinya dipikul oleh semua manusia (Anggada, 2021), karena cita-cita dari konservasi tidak akan terwujud apabila tidak terjadi kolaborasi yang cukup antara

pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat di dalamnya. YIARI berkomitmen pada upaya 3R dan M yang meliputi *Rescue, Rehabilitation, Release, dan Monitoring*. Sebagai sebuah Organisasi Non Pemerintah yang bergerak di bidang kesejahteraan satwa, YIARI memiliki visi yang terus beradaptasi dengan tren atau keadaan yang ada. Dalam hal ini YIARI bersifat fleksibel dan mampu berevolusi untuk menjadi semakin relevan dalam mencapai tujuannya. Adapun visi yang dimiliki oleh YIARI, yaitu “Terwujudnya Kehidupan Dimana Manusia dan Satwa Hidup Berdampingan dalam Ekosistem yang Berkelanjutan”.

YIARI menuangkan keseriusannya dalam Misi yang bersifat lebih global dibanding 3R dan M, yaitu: “Membangun Kesadaran akan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mengimplementasikan Sistem yang Efektif di mana Habitat dan Satwa dapat Terlindungi”. Dalam hal ini YIARI berkomitmen memberikan perlindungan bagi primata dan habitatnya dengan menggunakan pendekatan holistik. Pendekatan holistik yang YIARI gunakan berbentuk kerja sama multi pihak, baik nasional, regional, dan internasional dalam mewujudkan ekosistem yang harmonis. (Anggada, 2021).

Peran YIARI sebagai aktor non-negara banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang *pertama* adalah adanya perbedaan visi dan misi dalam konservasi satwa liar yang dilakukan oleh YIARI. Dalam hal ini, konservasi satwa liar yang dilakukan YIARI terhadap primata Monyet Ekor Panjang (MEP) yang tidak termasuk ke dalam daftar satwa dilindungi, sehingga tantangan yang dihadapi dalam megedukasi masyarakat menjadi lebih besar. Dalam hal ini, eksploitasi yang dimaksud adalah dengan menjadikan MEP sebagai satwa peliharaan. Namun demikian, hambatan yang dihadapi oleh YIARI tidak berhenti sampai di titik tersebut.

Pada tahun 2021, pemerintah KLHK melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen KSDAE-KLHK) berencana untuk menangkap dan mengeksport 2.070 ekor MEP untuk dijadikan uji coba bahan obat-obatan. Hal tersebut mendapatkan banyak

tentangan dari kelompok-kelompok yang memperjuangkan kesejahteraan satwa. Salah satunya adalah YIARI dan Koalisi Aksi Peduli Monyet. Dalam hal ini, MEP sudah masuk ke dalam *International Union for Conservation of Nature (IUCN) Red List* dengan status rentan. (CNN Indonesia, 2021).

Adapun desakan yang ditujukan untuk pemerintah dalam melarang tindak eksploitasi perdagangan primata MEP sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 2015 melalui petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 11.000 orang, karena banyak induk monyet yang harus mati di tangan manusia ketika dalam proses pemisahan antara induk dan anak (Apriando, 2018). Peristiwa tersebut cukup menjelaskan bagaimana pemerintah tidak memandang adanya keharusan untuk memasukkan MEP sebagai satwa yang perlu dikonservasi dan dilindungi. Dalam hal ini, belum munculnya tanggapan pemerintah KLHK terhadap isu eksploitasi terhadap MEP berkaitan dengan adanya pertimbangan potensi populasi bagi pemerintah KLHK. (Dindin Koesdinar, Wawancara, 2022).

Faktor *kedua* yang menghambat peran YIARI sebagai aktor non-negara adalah adanya regulasi yang membatasi ruang gerak bagi NGO YIARI dalam gerakan advokasinya. Hal tersebut dijelaskan oleh Ismail Agung Rusmadipraja dalam wawancara (18/08/2021) bahwa aksi advokasi terbatas oleh regulasi terkait publikasi yang tidak diperkenankan bernada negatif apabila isinya membahas tentang kinerja pemerintah. Dalam hal ini, Rusmadipraja sebagai Manajer Divisi Kampanye memaparkan contoh kasus terkait publikasi yang dilakukan oleh NGO “W” dimana respon yang diberikan oleh pemerintah berbentuk keputusan kerja sama di tahun 2020. Hal tersebut terkonfirmasi dalam artikel berita yang menjelaskan bahwa alasan KLHK memutus kerjasamanya dengan NGO “W” adalah adanya pelanggaran prinsip kerjasama dalam serangkaian publikasi dan kampanye media sosial. (Permana, 2020).

Faktor *ketiga*, adanya perbedaan prinsip konservasi antara pemerintah dan YIARI mengenai pengelolaan habitat satwa. Dalam hal

ini, habitat satwa yang dimaksud adalah satwa Orangutan yang menjadi salah satu fokus konservasi YIARI. Meskipun keberadaan Orangutan telah diakui sebagai satwa prioritas primata yang perlu dilindungi, pemerintah belum sepenuhnya tegas kepada para *stakeholders* yang ingin membuka lahan yang berdekatan dengan habitat Orangutan di Kalimantan. Hal ini dijelaskan bahwa sampai dengan saat ini masih ada pihak-pihak yang membuka lahan dengan mengkonversi seluruh kawasan termasuk habitat satwa primata jenis Orangutan di dalamnya. (Fadyl Anggada, Wawancara, 2021).

Peran Advokasi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dalam Bingkai Konstruktivisme

Berperannya Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) sebagai aktor advokasi dalam konservasi primata jenis Kukang mengkonfirmasi apa yang dijelaskan oleh teori Konstruktivisme yang ditulis oleh Dugis (2016). Dalam bukunya, ia menjelaskan bagaimana Konstruktivisme menjadikan sumber daya intelektual dalam mengkonfirmasi adanya nilai dan kepercayaan yang sama antara aktor-aktor, serta keefektifan proses negosiasi dan pembuatan aturan yang dilakukan oleh institusi-institusi dalam mengamankan proses interaksi yang dinamis. Dalam hal ini, YIARI membangun sebuah jejaring yang bersifat transnasional dengan organisasi, komunitas, dan institusi yang memiliki kesamaan visi-misi serta tujuan dalam konservasi lingkungan dan kesejahteraan satwa.

Peran advokasi YIARI juga menggambarkan bagaimana Konstruktivisme meyakini bahwa berbicara merupakan cara terpenting dalam membangun dunia (Onuf, 2013) melalui sosialisasi kampanye dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai konservasi primata jenis Kukang. Dalam hal ini, YIARI dibangun oleh individu atau kelompok manusia melalui interaksi dengan manusia lainnya. Hal tersebut tidak lepas keterkaitannya dengan TAN sebagai sebuah konsep yang hadir dalam Tonggak Ketiga kajian *Social Movement* yang merujuk pada sebuah kelompok advokasi lintas batas negara dan bersifat sukarela dalam

mencapai suatu kepentingan dengan merepresentasikan kepentingan publik (Soetjipto, 2018), dalam hal ini ialah kepentingan mengenai konservasi primata jenis Kukang di Indonesia.

***The Boomerang Pattern* dalam Advokasi Konservasi Primata Jenis Kukang oleh Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia**

Pola Bumerang digambarkan oleh Keck & Sikkink (1998) sebagai sebuah pola yang hadir ketika kanal komunikasi antara aktor negara dan aktor non-negara mengalami sebuah hambatan (*Blockages*). Dalam hal ini, aktor non-negara tidak diberi akses untuk berkomunikasi dengan target aktor atau bahkan target aktor yang tidak menciptakan perubahan yang diserukan, sehingga aktor non-negara tersebut membangun jejaring yang menghubungkannya dengan aktor lain dalam lingkup nasional, internasional, dan global. Sebagai aktor advokasi, NGO YIARI memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi komunikasi (*facilitating communication*), mendukung inovasi, *advocacy for and with the poor*, dan *research, Monitoring and Evaluation* (Dindin dkk., 2011). Dalam hal ini, Advokasi sebagai usaha yang ter-sistematis dan ter-organisasi untuk memengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap (Soetjipto, 2018).

Adapun dalam advokasinya, YIARI menghadapi beberapa faktor hambatan. *Pertama*, adanya perbedaan visi dan misi dalam konservasi satwa yang bersebrangan antara YIARI dan Pemerintah. Hal tersebut dikonfirmasi melalui wawancara dengan Dindin Koesdinar (11/04/2022) selaku Staff Pelaksana Tugas BKSDA Wilayah III Jawa Barat. Dalam wawancara tersebut, pak Dindin menjelaskan bahwa satwa yang masuk ke dalam daftar 25 satwa prioritas telah melalui beberapa pertimbangan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana satwa yang menjadi prioritas KLHK adalah satwa endemik yang jumlah populasinya terbatas. Dalam hal ini primata jenis Kukang belum menjadi prioritas KLHK, karena bagi KLHK populasi Kukang tidak berada dalam kategori terancam punah dan Kukang masih bisa ditemui dengan mudah di alam. Namun demikian, pernyataan tersebut justru

membuktikan bahwa konservasi primata jenis Kukang tidak didukung secara maksimal oleh pemerintah berdasarkan tindakan maupun regulasi terkait.

Ketidaksamaan visi dan misi dalam konservasi primata jenis Kukang yang dimiliki oleh YIARI dengan pemerintah Indonesia juga dikonfirmasi melalui wawancara dengan Dindin Koesdinar selaku Staff Pelaksana Tugas BKSDA Wilayah III Jawa Barat. Dalam wawancara tersebut, pak Dindin menjelaskan bahwa satwa yang masuk ke dalam daftar 25 satwa prioritas telah melalui beberapa pertimbangan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana satwa yang menjadi prioritas KLHK adalah satwa endemik yang jumlah populasinya terbatas. Dalam hal ini primata jenis Kukang belum menjadi prioritas KLHK, karena bagi KLHK populasi Kukang tidak berada dalam kategori terancam punah dan Kukang masih bisa ditemui dengan mudah di alam. Namun demikian, pernyataan tersebut justru membuktikan bahwa konservasi primata jenis Kukang tidak didukung secara maksimal oleh pemerintah berdasarkan tindakan maupun regulasi terkait. (Dindin Koesdinar, Wawancara, 11 April 2022)

Kurang maksimalnya peran dan pemerintah. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Robithotul Huda selaku Manajer Resiliensi Habitat YIARI Bogor (29/07/2021), peran pemerintah Indonesia dalam konservasi dapat dikatakan tidak maksimal dan cenderung setengah-setengah. Salah satunya adalah pengadaan peta hutan konservasi yang justru diperbaharui oleh YIARI sebagai aktor non-negara, karena pemerintah yang tidak bergerak bahkan setelah mereka mendapatkan laporan terkait hal tersebut.

Lalu, melalui wawancara dengan Pelaksana Tugas Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah II Jawa Barat (25/03/2022) peneliti memperoleh jawaban bahwa primata jenis Kukang bukanlah satwa prioritas yang menjadi fokus konservasi bagi BKSDA Wilayah II Jawa Barat. Dalam hal ini, narasumber mengatakan bahwa fokus konservasi mereka adalah Macan Tutul. Selain itu, kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap konservasi

primata jenis Kukang dikonfirmasi melalui wawancara dengan Staff Pelaksana Tugas Kepala Bidang BKSDA Wilayah III Jawa Barat (11/04/2022) yang juga menjelaskan bahwa memang fokus konservasi satwa yang dilakukan oleh pemerintah tidak menempatkan Kukang sebagai salah satu fokus satwanya dan untuk saat ini BKSDA Wilayah III Jawa Barat berfokus pada satwa prioritas Macan Tutul. Dalam hal ini, primata jenis Kukang dianggap belum *se-urgent* para satwa yang masuk ke dalam daftar 25 satwa prioritas, karena populasi Kukang masih terbilang banyak dan mudah ditemui di alam.

Penerapan regulasi terkait konservasi yang tidak maksimal. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai primata jenis Kukang untuk bisa hidup berdampingan di bumi menjadi salah satu faktor penghambat YIARI dalam menjalankan peran advokasinya dalam konservasi primata jenis Kukang. Sebagai satwa yang dilindungi, Kukang masuk ke dalam SK Menteri Pertanian 14 Februari 1973 No. 66/Kpts/Um/2/1973, PP Nomor 7 Tahun 1999, dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Kegiatan Konservasi. Kendati demikian, YIARI melihat tingginya angka eksploitasi primata jenis Kukang yang pada tahun 2013 hingga 2015 sebagai puncaknya. Kegiatan eksploitasi tersebut meliputi aksi “pamer” primata jenis Kukang sebagai peliharaan di media sosial yang mencapai angka 343 konten dengan 96% nya merupakan konten eksploitasi pada 2015. Lalu, aksi penyelundupan 23 individu primata jenis Kukang Jawa ke Filipina pada tahun 2015 (Kukangku, 2021) dan adanya kepercayaan tradisional masyarakat mengenai minyak yang berasal dari daging dan tulang Kukang yang diyakini memiliki nilai mistis sebagai obat peningkat stamina. (Sani, 2016)

Hal ini juga dijelaskan oleh Drh. Wendi Prameswari (2021) selaku Manajer *Animal Management* YIARI Bogor saat diwawancara, selama 10 tahun terakhir 50% Kukang yang masuk ke pusat rehabilitasi YIARI memiliki gigi yang sudah terpotong dan kondisi tulang yang keropos. Kondisi-kondisi tersebut dipicu dengan maraknya minat masyarakat untuk memelihara primata, sehingga para pedagang berusaha untuk ‘menjinakkan’ Kukang dengan cara memotong,

mengikir, dan bahkan mencabut paksa gigi Kukang tanpa menggunakan obat bius. Selain itu, berdasarkan fakta yang diperoleh melalui pemeriksaan rutin oleh Tim *Animal Management* tulang yang keropos ditengarai oleh keadaan malnutrisi pada Kukang yang dipelihara dengan pakan yang tidak seimbang antara kebutuhan kalsium dan fosfornya. Hal ini cukup menjelaskan bagaimana eksploitasi terhadap primata jenis Kukang dilakukan oleh manusia secara sadar tanpa mempertimbangkan dampak bagi satwa, manusia, dan lingkungan di masa yang akan datang.

Strategi Advokasi Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dalam Konservasi Primata Jenis Kukang di Indonesia

Sebagai aktor advokasi dalam konservasi primata jenis Kukang, YIARI telah menjalankan perannya selama 12 tahun dengan total 3500 Kukang yang berhasil diselamatkan, 3000 Kukang yang telah dilepasliarkan, dan 200+ Kukang yang masih menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi YIARI dengan total 11 kawasan (site) pelepasliaran Kukang di Indonesia. Dalam menciptakan jaringan advokasi transnasional guna mengamati dan menekan angka eksploitasi satwa liar khususnya primata jenis Kukang di Indonesia, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia telah menjalankan empat strategi yang bersifat persuasif, sosialisasi, dan menekan sebagaimana yang dipaparkan oleh Keck dan Sikkink (1998) dalam buku *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, yakni *Information politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*.

Information Politics

Information politics yang dilakukan oleh Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) berupa publikasi laporan tahunan terkait dengan kondisi satwa-satwa pasca penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran. Laporan-laporan ini meliputi latar belakang satwa yang masuk ke pusat rehabilitasi, titik konflik antara satwa dan manusia, program-program yang telah dilaksanakan, dan laporan keuangan YIARI selama satu tahun. Melalui laporan tersebut, YIARI memaparkan informasi

mengenai kondisi primata jenis Kukang yang masuk ke pusat rehabilitasi merupakan hasil dari kegiatan eksploitasi berupa pemburuan, perdagangan ilegal, dan pemeliharaan terhadap satwa liar.

Peran dan strategi *Information Politics* YIARI dalam konservasi primata jenis Kukang di Indonesia juga dapat diamati pada pemilihan Internet dan Media Sosial oleh YIARI sebagai wadah yang dijadikan sebagai sumber informasi alternatif bagi masyarakat. Hal ini dijelaskan langsung oleh Manajer *Campaign* YIARI Bogor mengenai peran *Social Media Guard* yang YIARI pada 2017 hingga 2018 yang berhasil memberikan dampak positif berupa penurunan angka tren yang signifikan dalam satu tahun. YIARI juga menggunakan laman websitenya sebagai sebuah medium kreasi aneka konten edukatif mengenai satwa liar yang menjadi korban eksploitasi. Dalam hal ini YIARI menyajikan artikel yang didasarkan pada fakta lapangan dan dokumen-dokumen resmi. Misal, Bulletin SIAR (Surat dari IAR) yang hadir di tahun 2019 dengan harapan dapat meningkatkan angka kepedulian terhadap kesejahteraan satwa di Indonesia primata jenis Kukang yang secara internasional berstatus *critically endangered*.

Posisi YIARI yang konsisten dalam menyuarakan kesejahteraan hewan tersebut telah mempermudah mereka untuk menarik lebih banyak organisasi ataupun institusi yang bergerak di bidang serupa. Sebagai sebuah NGO yang bergerak di bidang lingkungan dan kesejahteraan satwa, YIARI cenderung memiliki kesamaan dengan *World Society for the Protection of Animal* (WSPA) yang tidak hanya sekadar mengangkat kesejahteraan hewan sebagai isu sosial dengan berdasar pada etika universal biosentrisme, namun juga karena adanya pertimbangan terhadap aspek rasionalitas antroposentrisme yang memandang pola hubungan antara manusia dengan alam merupakan sebuah relasi instrumental (Soetjipto, 2018). YIARI juga kerap menggelar webinar yang di dalamnya membahas tentang keberadaan satwa liar dilindungi termasuk primata jenis Kukang sebagai topik pembicaraan. Dalam hal ini, webinar menjadi jembatan tersendiri bagi YIARI dalam

memperluas jumlah pendukung dan jejaringnya (Ismail Agung Rusmadipraja, Wawancara, 18 Agustus 2021). Webinar tersebut diberi judul *Human Wildlife Series (HWS)* yang hadir setiap bulan.

Symbolic Politics

YIARI membingkai isu kesejahteraan satwa sebagai sebuah tanggung jawab bagi umat manusia. Dalam hal ini, YIARI bertujuan untuk mewujudkan ekosistem berkelanjutan untuk keselarasan hidup manusia, satwa liar, dan Lingkungan di Indonesia, sehingga dalam menjalankan perannya YIARI banyak menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam konservasi lingkungan dan kesejahteraan satwa di Indonesia. Sebagai Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Primata Jenis Kukang terbesar di Indonesia, YIARI Bogor memiliki program-program yang terfokus pada hal tersebut. Salah satunya adalah program kampanye Kukangku yang hadir pada tahun 2015. (Fadyl Anggada, Wawancara, 03 Juli 2021).

Dalam konservasi primata jenis Kukang, YIARI juga menjalankan *Symbolic Politics* melalui slogan “Stop Kekang Kukang” dalam Program Kampanye Kukangku yang hadir sejak tahun 2014. Dalam hal ini YIARI bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) menegaskan posisinya sebagai *Social Media Guard* yang berfokus dalam menjaring para oknum meliputi pedagang, pemburu, dan pembeli/pemelihara untuk kemudian diproses ke pengadilan. *Symbolic Politics* atau Politik Simbolik didefinisikan oleh Ani Soetjipto (2018) sebagai sebuah upaya bagi aktivis dalam membingkai isu yang diadvokasi dengan bahasa yang lebih umum guna menarik lebih banyak pihak untuk mendukung aksi advokasi yang dilakukan. Politik Simbolik yang dimaksud ialah bahasa yang lebih sederhana dalam bentuk jargon, slogan, dan tokoh simbolis serta media sebagai alat pendukung (Soetjipto, 2018).

Leverage Politics

Jejaring yang terbangun antara YIARI dengan IAR Inggris menjadi jalan tersendiri bagi kedua

organisasi dalam memfasilitasi kesamaan visi dan misi di bidang Konservasi Kesejahteraan Satwa dan Lingkungan agar lebih mudah tercapai. Dalam hal ini Indonesia dinilai sebagai negara potensial dalam menjalankan visi dan misi tersebut, begitu pun dengan YIARI yang membangun kerja sama guna memperluas jejaring dan memfasilitasi aksi advokasi mereka yang tergambar jelas dengan IAR Inggris sebagai donatur tetap bagi YIARI. Lalu, YIARI juga berkolaborasi bersama organisasi lain dalam pelaksanaan program webinar dengan mengundang para ahli baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mumpuni dalam bidang konservasi serta bidang lainnya. Dalam hal ini, YIARI kerap bekerja sama dengan organisasi dan komunitas serupa lainnya untuk menjadi sponsor hingga narasumber.

Adapun jejaring YIARI meliputi KLHK, POLRI, *United Nations Development Programme (UNDP)*, *Arcus Foundation*, *Pro Wildlife*, *Kadoorie Farm & Botanic Garden*, *Rettet den Regenwald*, *United States Agency for International Development (USAID)*, *U.S. Fish & Wildlife Service*, TFCA Kalimantan, *Wildlife Reserves Singapore*, *Orangutan Veterinary Aid (OVAID)*, KEHATI, *The Rufford Foundation*, dan *Ocean Park Conservation Foundation Hong Kong*, ProFauna, Gibbonesia, Greeneration, Teens Go Green Indonesia, BOS Foundation, Mongabay, dan mitra-mitra organisasi, institusi, dan komunitas lainnya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Keck & Sikkink (1998) bahwa *Leverage Politics* atau politik pengaruh merupakan sebuah strategi yang dilakukan oleh aktor non negara dalam jejaring advokasi dalam mendapatkan dampak yang lebih besar lagi dalam mencapai tujuan aksi advokasinya. Politik Pengaruh berbicara tentang pengaruh material (*material leverage*) dan pengaruh moral (*moral leverage*) yang memiliki keterkaitan dengan bantuan dan donasi (Soetjipto, 2018), argumen tersebut menjelaskan bagaimana Politik Pengaruh bersifat persuasif dan menekan dalam setiap aksi advokasi yang dijalankan.

Namun demikian, YIARI tidak sepenuhnya menjalankan strategi Politik Pengaruh secara maksimal dalam konservasi primata jenis

Kukang dan satwa liar lainnya, karena relasi yang terbangun dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak sepenuhnya memberikan kesempatan bagi YIARI untuk mengubah kebijakan terkait hukum bagi para pedagang, pemelihara, dan pemburu Kukang di Indonesia. Selain itu, YIARI juga belum berani menjalankan Politik Pengaruh berupa pengaruh moral terhadap pemerintah dalam hal ini ialah KLHK & BKSDA yang secara nyata memang belum maksimal dalam merespons isu eksploitasi satwa primata jenis Kukang dan satwa liar dilindungi lainnya di Indonesia.

Accountability Politics

Strategi Politik Akuntabilitas terhadap pemerintah Indonesia dalam hal ini ialah Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan oleh YIARI adalah penyimpanan bukti komitmen pemerintah dalam menanggapi dan menangani isu eksploitasi satwa primata dilindungi yang kian marak terjadi di Indonesia. Bukti komitmen tersebut berupa kebijakan dan ketetapan hukum yang hadir sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah. Misalnya, peran pemerintah yang tidak konsisten dalam memberikan bantuan berupa peta kawasan yang sepatutnya mencakup kajian karakteristik lokasi, sehingga YIARI harus membuat pemodelan dalam kawasan konservasi. Dalam hal ini peta kawasan konservasi Cagar Alam Bojong Larang Jayanti yang diberikan oleh KLHK belum pernah diperbaharui sama sekali sejak awal peresmian hingga saat ini, di mana peta tersebut tidak memiliki data verifikasi terkait letak lahan yang digarap oleh petani, luas wilayah, dan kondisi terkini dari kawasan tersebut menjadi tidak spesifik, sehingga menghambat berjalannya proses konservasi primata jenis Kukang yang habitatnya ada di dalam Cagar Alam Bojong Larang Jayanti (Huda, 2021).

Ketentuan mengenai kemitraan KLHK tertulis dalam Peraturan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Bab II Kemitraan Konservasi dalam Rangka

Pemberdayaan Pasal 16 mengenai tahap persiapan yang meliputi inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi, penentuan dan penetapan arah pengelolaan dan pemanfaatan, pengkajian karakteristik lokasi, memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok masyarakat. Peraturan KSDAE tersebut menjelaskan bagaimana pemerintah memiliki peran yang besar dalam menjamin kelancaran konservasi sumber daya alam di Indonesia. Dalam hal ini, KLHK sebagai mitra yang memberikan izin konservasi kepada YIARI seharusnya juga mampu untuk lebih memahami dan mendetail tentang peta konservasi yang bersifat krusial.

Namun demikian, YIARI masih belum berani untuk menagih janji yang diberikan oleh pemerintah KLHK dalam konservasi primata jenis Kukang, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh NGO lingkungan lainnya yang secara terang-terangan memaparkan fakta lapangan dan membungkam pemerintah dengan fakta dan data yang ada. Selain itu, YIARI juga berharap satwa-satwa yang memerlukan dan sedang tinggal di pusat rehabilitasi tidak kehilangan harapan untuk bisa Kembali ke habitat aslinya. Hal ini menjelaskan posisi YIARI sebagai mitra pemerintah memiliki ruang yang terbatas terkait dengan izin kemitraan konservasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, YIARI sebagai aktor non-negara telah melakukan berbagai strategi dalam menyuarakan isu konservasi satwa di Indonesia. Kesungguhan YIARI dalam menjalankan perannya dapat dibuktikan dengan tujuannya dalam mewujudkan kehidupan dimana manusia dan satwa dapat hidup berdampingan di dalamnya. Salah satu fokus satwa utama YIARI adalah primata jenis Kukang. Peran advokasi YIARI dalam konservasi primata jenis Kukang di Indonesia mulai gencar pada tahun 2015 yang menjadi tahun dengan tingkat eksploitasi Kukang yang tinggi meliputi Perdagangan Ilegal, Pemeliharaan Kukang sebagai Satwa peliharaan, dan Perburuan.

YIARI berafiliasi dengan IAR Inggris dan IAR Amerika Serikat guna memperkuat posisinya sebagai aktor advokasi dalam konservasi primata jenis Kukang. Dalam hal ini, hubungan transnasional yang terjalin antara YIARI dengan IAR Inggris dan IAR Amerika Serikat dapat diamati melalui pendanaan program yang setiap tahunnya dialirkan dengan angka yang besar setiap tahunnya. Melalui jaringan transnasional yang terjalin antara YIARI dengan IAR Inggris dan IAR Amerika Serikat berhasil menarik mitra dan kontributor dalam menjalankan perannya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berdirinya Pusat Pembelajaran Sir Michael Uren di Ketapang, Kalimantan Barat yang dalam prosesnya melibatkan IAR Inggris dan IAR Amerika Serikat sebagai fasilitator dialog. Dalam hal ini YIARI telah menjalankan peran advokasinya sebagai NGO yang bergerak di bidang lingkungan dan kesejahteraan satwa secara maksimal dengan cara membentuk jaring-jaring advokasi transnasional di negara-negara yang juga menaruh perhatian terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan satwa.

REFERENSI

- Albertus, Yanuar. (2020). Jaringan Advokasi transnasional: Strategi Greenpeace dalam menolak Rencana Pengeboran Shell di Kutub Utara Tahun 2012-2015. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Parahyangan Centre for International Studies (PACIS)*, Vol. 17, No. 2, pp. 239-260. Doi: <https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.2063.239-260>
- Alter, K. & Meunier, S. (2009). The politics of international regime complexity. *Perspectives on Politics*, 7(1), pp. 13-24.
- Azizah, Nur, dan Murti, Sri Asfarina. (2019). Peran European Women's Transnational Advocacy Networks (TANS) dalam Mengkonstruksi Regime Kesetaraan Gender di Uni Eropa. *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 3, No. 1, pp. 52-79.
- Apriando, Tommy. (2018). "Ramai-Ramai Desak Setop Perdagangan Monyet". Tautan: <https://www.mongabay.co.id/2018/10/11/ramai-ramai-desak-setop-perdagangan-monyet/> (Diakses pada 12 April 2022 pukul 16.41 WIB).
- Banyu, P., Agung, A., & Yani, Y. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Barkin, J., Samuel. (2006). *International Organization: Theory and Institutions*. United States of America: Palgrave Macmillan.
- Creswell, John, W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches 3rd Edition*. California: SAGE Publications.
- Davis, Thomas. (2019). *Routledge Handbook of NGOs and International Relations*. New York: Routledge.
- Denzin, Norman K., dan Lincoln, Yvonna S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research Fifth Edition*. California: SAGE Publications.
- Dugis, Vinsensio. (2016). *Teori Hubungan Internasional: Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Hobson, John. M. (2003). *The State and International Relations*. New York: Cambridge University Press.
- Huda, Robithotul. (2021, 29 Juli). Wawancara Manajer Divisi Resiliensi Habitat YIARI. (Sahda Nabilah Agusta, Interviewer).
- IAR Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan 2018: Mewujudkan Ekosistem Berkelanjutan untuk Keselarasan Hidup Manusia, Satwa Liar dan Lingkungan*.
- IAR Indonesia. *Tentang Kami*. (2021): "Kami dan Kukang". Tautan: <https://www.internationalanimalrescue.or.id/program/konservasi-kukang/>.
- IUCN Red List. *Slow Loris*. Tautan. (2022): <https://www.iucnredlist.org/search?query=Slow%20Loris&searchType=species>.
- Irawan, Andy. (2022, 25 Maret). Wawancara Pelaksana Tugas Kepala Seksi Konservasi BKSDA Wilayah II Jawa Barat. (Sahda Nabilah Agusta, Interviewer).
- Keck, Margaret E. dan Sikkink, Kathryn. (1998). *Activist Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. London: Cornell University Press.

- Koesdinar, Dindin. (2022, 11 April). Wawancara BKSDA Wilayah III Jawa Barat. (Sahda Nabilah Agusta, Interviewer)
- Kukangku. (2022). Dinamika Konservasi Kukang. Tautan: <https://kukangku.id/konservasi/>.
- Lather, P. (1986). Research as praxis. *Harvard Educational Review*, 56, 257–277.
- LIPI. (2018). “Perdagangan Satwa Menggila, Berikut Foto-foto Hasil Sitaan”. Tautan: <http://lipi.go.id/lipimedia/Perdagangan-Satwa-Menggila-Berikut-Foto-foto-Hasil-Sitaan/20521>
- Marsingga, Prilla. (2020). Studi Keamanan Lingkungan: Aktor Transnasional dalam Penanganan Pencemaran Sungai Citarum. *Jurnal Komunikasi, Masyarakat dan Keamanan (KOMASKAM)*, Vol. 2, No. 1, pp. 66-99.
- Matondang, Nora Fery., Bainah, Sari Dewi., dan Winarti, Indah. (2018). Penggunaan Ruang Kukang (*Nycticebus coucang*) Pelepasliaran International Animal Rescue Indonesia Di Hutan Lindung KPHL Batutegi Blok Kalijernih Tanggamus Lampung”. *Jurnal Sylva Lestari*, Vol. 6, No.1, Januari 2018, pp. 39-49.
- Maziyah, Roihanatul. (2020). Seafood not Slavefood: Advokasi Aktivisme Transnasional untuk Mengakhiri Praktik Perbudakan Modern di Industri Pakanan Thailand. *Journal of International Relations*, Vol. 6, No. 1, 2020, pp. 92-107.
- Mas’oed, Mohtar. (1990). Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.
- Nassaji, Hossein. (2015). Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis. *Language Teaching Research*, Vol. 19(2), pp. 129-132.
- Nye, J., dan Keohane, R. (1971). Transnational Relations and World Politics. *International Organization*, 25(3): 329-349.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th Edition). London: Pearson Education Limited.
- Onuf, N., Greenwood. (2013). Making Sense, Making World: Constructivism in Social Theory and International Relations. New York: Routledge.
- Peña, A.M., (2018). The Politics of Resonance: Transnational Sustainability Governance in Argentina. *Regulation & Governance*, 12(1), pp. 150–170.
- Prameswari, Wendy. (2021, 05 Juli). Wawancara Manajer Divisi Animal Management YIARI. (Sahda Nabilah Agusta, Interviewer).
- Rusmadipraja, Ismail Agung. (2021, 18 Agustus). Wawancara Manajer Divisi Kampanye YIARI. (Sahda Nabilah Agusta, Interviewer).
- Risse, T., Ropp, S. C., & Sikkink, K. (1999). International Norms and Domestic Change (First). New York: Cambridge University Press.
- Soetjipto, Ani (ed). (2018). Transnasionalisme: Peran Aktor Non Negara dalam Hubungan Internasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Septian, Reza. (2019). “BKSDA Cirebon dan IAR Indonesia Selamatkan Bayi Kukang Tanpa Induk di Kebun Warga”. Tautan: <https://www.internationalanimalrescue.or.id/bksda-cirebon-dan-iar-indonesia-selamatkan-bayi-kukang-tanpa-induk-di-kebun-warga/>
- Septian, Reza. (2019). “IAR Indonesia Membuka Pusat Pembelajaran bagi Kegiatan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat”. Tautan: <https://www.internationalanimalrescue.or.id/iar-indonesia-membuka-pusat-pembelajaran-bagi-kegiatan-konservasi-dan-pemberdayaan-masyarakat/>
- Suciadi, Heribertus. (2021) “Aktif mengurangi Sampah Plastik dan Berdaur Ulang Bagi Masa Depan Bumi”. Tautan: <https://www.internationalanimalrescue.or.id/aktif-mengurangi-sampah-plastik-dan-berdaur-ulang-bagi-masa-depan-bumi/>
- Suciadi, Heribertus. (2022). “Muda, Beda, dan Berbahaya”. Tautan: <https://www.internationalanimalrescue.or.id/muda-beda-dan-berbahaya/>
- Virgy, Arief., Djuyandi, Yusa., dan Darmawan, Wawan, B. (2020). Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International. *Journal of Political Issues* 1(2), 74-91 Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>

Wahyudin, Dindin., dkk. (2011). Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) Di Indonesia. Jakarta: Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri.

Weber, Cynthia. (2005). *International Relations Theory: A Critical Introduction*, New York: Routledge.

Wendt, Alexander. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, 46(2), 291-425.